

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
NOMOR: DS – 264 TAHUN 2022**

**TENTANG :
PENETAPAN PENERBITAN DAN HONORARIUM REVIEWER JURNAL ILMIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EDISI DESEMBER TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Rumah Jurnal dalam mengelola Jurnal Ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga membutuhkan Penguatan Rumah Jurnal dalam penerbitan Jurnal Ilmiah dan honorarium Reviewer, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Honorarium Reviewer;
- b. bahwa nama Jurnal Ilmiah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang layak serta memenuhi syarat untuk diterbitkan dan dialokasikan anggaran untuk Penerbitan;
- c. bahwa nama Reviewer sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang layak serta memenuhi syarat untuk menjadi Reviewer dalam penerbitan Jurnal Ilmiah yang dikelola oleh Rumah Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b dan c sebagaimana tersebut di atas perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 26 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor: 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK. 02/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pemuat Komitmen Pascasarjana Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan : DIPA BLU Tahun Anggaran 2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2022 tanggal 17 November 2021 Revisi 15 tanggal 21 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENERBITAN DAN HONORARIUM REVIEWER JURNAL ILMIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA EDISI DESEMBER TAHUN 2022.
- Pertama : Menetapkan nama Jurnal Ilmiah dan Reviewer yang tercantum pada Lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai Jurnal Ilmiah yang diterbitkan mendapat biaya cetak Edisi Desember Tahun 2022 dan Honorarium Reviewer Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022;
- Kedua : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, MAK. 2132.BGC.001.055.HH.525112: 525113.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak **tanggal 1 Juli – 31 Desember 2022** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 NOVEMBER 2022
a.n. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



MAKHHRUS

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. BPP Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA****NOMOR : DS-264 TAHUN 2022****TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022****TENTANG : PENETAPAN PENERBITAN DAN HONORARIUM REVIEWER JURNAL ILMIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA EDISI
DESEMBER TAHUN 2022.**

DAFTAR PENETAPAN REVIEWER INTERNAL PADA JURNAL ILMIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EDISI DESEMBER TAHUN 2022

1. ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

NO.	NAMA REVIEWER	JMLH ARTIKEL	JUDUL ARTIKEL
1.	Dr. Riyanta, M.Ag	2 (dua)	1. Urgensi Nafkah Produktif untuk Anak dalam QS. An-Nisa': 09 dengan Pendekatan Maqāṣid As-Syari'ah 2. Upaya Mengatasi Prasangka Sosial Terhadap Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman beradasar Fiqh hingga Praktek
2.	Dr. Ali Sodikin, M.Ag	4 (empat)	1. Sirri Marriage and Underage Marriage: A Study of Women's Marginalization Perspective of Family Law 2. Penerapan Metode Al-Istiqra' Al-Ma'nawi dalam Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti 3. Saprah Amal, Hak Konstitusi, Dan Demokratisasi: Habitus Praktik Filantropi Masyarakat Sipil Islam Banjar di Kalimantan Selatan 4. Works of Faith Based Leaders on The Principles of Islamic Law for Preventing and Transforming
3.	Fuad Mustafid	4 (empat)	1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan Antara China dan Indonesia 2. Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Kasus Penistaan Agama Basuki Djahadja Purnama (AHOK) Perspektif Maqashid Syari'ah 3. Perdebatan Euthanasia antara Hak Asasi Manusia, Kedokteran, dan Hukum Islam: Menemukan Jalan Tengah 4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintahan Kota Banda Aceh (Relasi Fatwa dan Kebijakan)
4.	Dr. Siti Fatimah, S.H	3 (tiga)	1. Legal Problems Implementation of MK Decision Number 49/PUU-IX/2011 2. Urgensi Independensi Peradilan Dalam Kasus Disparitas Putusan Perkara Korupsi 3. Interpretasi dan Implementasi Iktikad Baik dalam UU No 2 Tahun 2020 di Masa Pandemi
5.	Drs. Abdul Halim, M.Hum	2 (dua)	1. Problematika Penerapan Hukum Adat Indonesia di Tengah Berlakunya Hukum Negara 2. Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama Pada Era Reformasi, Suatu Kajian Perbandingan
6.	Husnul Khitan, Lc. M.H	2 (dua)	1. Peranan Fatwa DSN-MUI Pada Pengelolaan Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah 2. Hakikat Mediasi Sengketa Perceraian Dalam Kajian Filsafat Hukum

7.	Khairul Anam, SHI., M.SI	2 (dua)	1. Sistem Pemerintahan Kedepatan di Jambi Dalam Perspektif Siyasah 2. Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang dan Undang-undang no 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: Tinjauan Berdasarkan Fiqh Siyasah
8.	Hijrian Angga P, Lc, LL.M	4 (empat)	1. Islamic Law and Legal Positivism: Comparative Study of Law in the Perspective of Philosophy of Science 2. Urgensi Legitimasi Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Kajian Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah 3. Aturan Larangan Pengajian Selain I'tiqād Ahlu'ssunna Wa'l-Jamā'ah Di Aceh Perspektif David 4. Pemikiran Abid Al-Jabiry dan Gagasan Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Era Kontemporer
9.	Bustanul Arifin Rusydi, S.H, M.H	4 (empat)	1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Bullying dari Sudut Pandang Psikologi Kriminal Serta Pengaturannya di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia 2. Perlindungan Hukum Hak Pekerja Yang Terkena PHK Akibat Pandemi Covid-19 3. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terkait Ketidakabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan 4. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)
10.	Mu'tasim Billah, S.H.I, M.H	5 (lima)	1. Pertimbangan Kafa'ah Nasab (Kafa'at an-Nasb) dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan 2. Perempuan Sebagai Pelaku dan Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Teori Istislahiah Al Yasa' Abubakar 3. Judicial Review of Criminal Law on The Arrest of Ananda Badudu As a Fundraiser (Crowdfunding) Build Upon Article 17 on The Code of Criminal Procedure 4. Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City) 5. Islamic Nusantara Habitual Culture (Al-Urf) The Socio-Cultural Perspective of al-Fiqh and Religious Values Inheritance on Tarekat Believers in Indonesia
11.	Jihadul Hayat, M.H	2 (dua)	1. Ta'aruf Melalui Media Sosial Perspektif Masalah Studi Media Sosial BJR (Biro Jodoh Rumaysho) 2. Waqf of The Bangsamoro in The Philippines: Issues and Challenges
12	Ulul Albab Mushaffa, M.H	3 (tiga)	1. Penegakan Hukum Lawrence M Freidman dalam Hukum Asuransi Syariah di Indonesia 2. Ambiguitas Akad Gopay dalam Perspektif Muamalah 3. Waqf of The Bangsamoro in The Philippines: Issues and Challenges

2. AL-AHWAL : Jurnal Hukum Keluarga Islam

NO.	NAMA REVIEWER	JMLH ARTIKEL	JUDUL ARTIKEL
1.	Dr. Ahmad Bunyan Wahib	5 (lima)	1. Reconstruction of the Sakinah Family in the Time of Covid-19 2. Nalisis Hukum Progresif terhadap Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020.

			3. Perkawinan Beda Agama Islam-Hindu di Bali 4. An analysis of Household Resilience and Divorce within Muslim Families Amidst the Covid-19 Pandemic 5. Mainstreaming Conservative Thought of Polygamy? A Study on Digital Discourse on Indonesian Islamic Websites
2.	Muhammad Jihadul Hayat, M.H	8 (delapan)	1. Pesantren's Matchmaking: the Role of Wali Mujbir in Matchmaking with Maqasid Syariah Perspective 2. Otoritas Ninik Mamak sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru 3. Perjanjian Kawin Dayak Ngaju Muslim di Kota Palangka Raya dalam Mencegah Perceraian (Tinjauan Hukum Islam) 4. The Fulfillment of Children's Rights in the Case of Divorce: A Study at Padangsidempuan Religious Court 5. Cut Konde as a Traditional Walimat al'Ursy Among the Muslim of Gunung Meriah Aceh 6. Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami 7. Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Tengah Pandemi covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) 8. Marital Rape" dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia
3.	Taufiqurohman, M.H	6 (enam)	1. The Concept of Kafa'ah and Marriage Guardians in the Book of as-Silah fi Bayani an-Nikah by Shekh Khalil al-Bangkalany Lathif Bangkalan-Madura 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Penetapan Perkara Nomor 95/pdt.p/2017/PA.MPW) 3. Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek dan Korelasinya terhadap Hak-hak Mantan Istri 4. Genz and Marriage Planning: Perceptions of Muslim Generation z in Banjarmasin City on Prenuptial Agreements 5. Disparitas Putusan Mahkamah Agung No. 16 k/ag/2010 tentang Hak Waris Istri Non Muslim 6. Marriage Law in the Law Countries of Somalia, Ghana and Nigeria
4.	Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H	2 (dua)	1. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pluralisme Hukum terhadap Kelompok LGBT+ di Indonesia 2. Efektivitas Pemenuhan Hak Anak dengan Membentuk Relasi Pasca Perceraian di Kabupaten Bima
5.	Bustanul Arifien Rusydi, M.H	2 (dua)	1. Pemaknaan Ratik oleh Suku Guci sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Keluarga dan Masyarakat: Studi Alternatif Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Desa Ladang Laweh Nagari Kapau 2. Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)

3. AZ-ZARQA : Jurnal Hukum Bisnis Islam

NO.	NAMA REVIEWER	JMLH ARTIKEL	JUDUL ARTIKEL
1.	Muhammad Ulul Albab Musaffa	2 (dua)	1. SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah 2. The Nisbah of Indomaret Musyarakah Franchise in Indonesia: MUI Approach
2.	Diqy Faqih Maulana	2 (dua)	1. Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung 2. Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development

3.	Saifuddin	1 (satu)	1. Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management
4.	Gusnam Haris	1 (satu)	1. Temporary Waqf as a Study of Fiqh Muamalah (Juridical Thoughts and Possibility of Its Implementation)
5.	Hasfi Luthfi	1 (satu)	1. Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung
6.	Widyarani	1 (satu)	1. Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management
7.	Farah Syamila Rosyida	2 (dua)	1. Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPdata 2. Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung)

4. SUPREMASI: Jurnal Kajian Ilmu Hukum

NO.	NAMA REVIEWER	JMLH ARTIKEL	JUDUL ARTIKEL
1.	Faiq Tobroni, M.H.	1 (satu)	Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/Pn.Niaga.Sby/2022 tentang Renvoi Prosedur)
2.	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.	1 (satu)	Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
3.	Iswantoro, S.H., M.H.	1 (satu)	Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam
4.	M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.	1 (satu)	Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy
5.	Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.	2 (dua)	1. Comparative Law: Optimizing Legal Framework Privacy Data Protection In Indonesia 2. Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy
6.	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	1 (satu)	Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/Pn.Niaga.Sby/2022 tentang Renvoi Prosedur)
7.	Yulianta Saputra, S.H. M.H.	2 (dua)	1. Comparative Law: Optimizing Legal Framework Privacy Data Protection In Indonesia 2. Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis

a.n. Rektor,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



MAKHRUS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**NOMOR : DS-264 TAHUN 2022****TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022****TENTANG : PENETAPAN PENERBITAN DAN HONORARIUM REVIEWER JURNAL ILMIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA EDISI
DESEMBER TAHUN 2022.****DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM REVIEWER LUAR PADA JURNAL ILMIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EDISI DESEMBER TAHUN 2022****1. ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum**

NO	NAMA	PANG./ GOL.	ASAL INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
1.	Aroma Elmina Martha, S.H., M.H	PNS/IVB	UII Yogyakarta	2 (dua)	1. Urgensi Independensi Peradilan Dalam Kasus Disparitas Putusan Perkara Korupsi 2. Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Bullying dari Sudut Pandang Psikologi Kriminal serta Pengaturannya di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia
2.	M. Luthfi Hakim	PNS-Lektor / III/D	IAIN Banjarmasin	2 (dua)	1. Pemikiran Abid Al-Jabiry dan Gagasan Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Era Kontemporer 2. Pengusiran bagi Pelaku Zina <i>Muhshan</i> Di Panyabungan: Studi Analisis Hukum Islam
3.	Kukuh Tedjo Murthi, SH. LL.M	PNS- Asisten Ahli / IIIb	UNS Surakarta	2 (dua)	1. Interpretasi dan Implementasi Iktikad Baik dalam UU No 2 Tahun 2020 di Masa Pandemi 2. Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City)
4.	Ridwan Arifin, SH., LL.M	PNS / Asisten Ahli/ IIIb	UNNES Semarang	2 (dua)	1. Urgensi Independensi Peradilan Dalam Kasus Disparitas Putusan Perkara Korupsi 2. Problematika Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011
5.	Anis Ni'am Imana	Non PNS	Universitas Dian Nuswantoro Semarang	2 (dua)	1. Peranan Fatwa DSN-MUI Pada Pengelolaan Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah 2. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan <i>Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah
6.	Andi Luqman Qosim	NON PNS Asisten Ahli	IAIN Salatiga	2 (dua)	1. Pertimbangan Kafa'ah Nasab (Kafa'at an-Nasb) dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan 2. Urgensi Nafkah Produktif untuk Anak dalam QS. An-Nisa': 09 dengan Pendekatan Maqāsid As-Syari'ah

7.	Fahim Khasani	NON PNS Asisten Ahli	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1 (satu)	1. Peranan Fatwa DSN-MUI Pada Pengelolaan Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah
8.	Beko Hendro AM	NON PNS Asisten Ahli	UIN Raden Fatah Palembang	1 (satu)	1. Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang dan Undang- undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Tinjau Fiqih Siyasah

2. AL-AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam

NO	NAMA	PANG./ GOL.	INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
1.	Arifki Budia Warman	PNS Asisten Ahli/IIIb	UIN Mahmud Yunus, Batusangkar	2 (dua)	1. Reconstruction of the Sakinah Family in the Time of Covid-19 2. Nalisis Hukum Progresif terhadap Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020.
2.	Roykhatun Nikmah	PNS Asisten Ahli/IIIb	UIN Raden Mas Said, Surakarta	2 (dua)	1. Pesantrean's Matchmaking: The Role Of Wali Mujbir In Matchmaking With Maqasid Syariah Prespective 2. Otoritas Ninik Mamak sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru
3.	Asrizal	PNS Asisten Ahli/IIIb	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	2 (dua)	1. The Concept of Kafa'ah and Marriage Guardians in the Book of as-Silah fi Bayani an-Nikah by Shekh Khalil al-Bangkalanyl Lathif Bangkalan-Madura 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik.
4.	Sheila Fakhria	PNS Lektor / IIIId	IAIN Kediri	1 (satu)	1. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pluralisme Hukum terhadap Kelompok LGBTQ+ di Indonesia
5.	Muchimah	Non PNS Lektor / IIIId	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	2 (dua)	1. Pemaknaan Ratik oleh Suku Guci sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Keluarga dan Masyarakat: Studi Alternatif Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Desa Ladang Laweh Nagari Kapau 2. Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)
6.	Najih Abqori	PNS Asisten Ahli/IIIb	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo.	2 (dua)	1. Marriage Law in the Law Countries of Somalia, Ghana and Nigeria 2. Marital Rape" dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia

7.	Mukhammad Nur Hadi	PNS Asisten Ahli/IIIb	UIN Sunan Ampel Surabaya	2 (dua)	1. The Fulfillment of Children's Rights in the Case of Divorce: A Study at Padangsidempuan Religious Court 2. Cut Konde as a Traditional Walimat al'Ursy Among the Muslim of Gunung Meriah Aceh
8.	Kholifatun Nur Mustofa	PNS Asisten Ahli/IIIb	UIN Salatiga	2 (dua)	1. Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami 2. Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Tengah Pandemi covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)
9.	Kemas Muhammad Gemilang	PNS Asisten Ahli/IIIb	UIN Syarif Kasim Riau	2 (dua)	1. Gen z and Marriage Planning: Perceptions Of Muslim Generation Z In Banjarmasin City on Prenuptial Agreements 2. Disparitas Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang Hak Waris Istri Non Muslim

3. AL-MAZAAHIB: Jurnal Perbandingan Hukum

NO	NAMA	PANG./ GOL.	INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
2.	Adi Nur Rohman	PNS Lektor / IIId	Univ Bhayangkara Jakarta	3 (tiga)	1. Komparatif UU Filantropi Di Indonesia (Studi UU Pengumpulan Uang Atau Barang dan UU Zakat) 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan 3. Konten Youtube Tentang Laporan Palsu Kdrt Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam
3.	Muhammad Marizal	PNS Asisten Ahli/IIIb	Univ Tidar Magelang	2 (dua)	1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan 2. Konten Youtube Tentang Laporan Palsu Kdrt Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam

4.	Nuzulia Febri Hidayati	PNS Asisten Ahli/IIIb	UNU Yogyakarta	4 (empat)	1. Hukum Jual Beli Asi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik 2. Ketentuan Melafadzkan Rukun Qauli Dalam Salat Bagi Difabel Wicara (Analisis Imam Abu Hanifah Dan Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i) 3. Komparatif UU Filantropi Di Indonesia (Studi UU Pengumpulan Uang Atau Barang dan UU Zakat) 4. Pawai Takbir Mobil Hias Malam 1 Syawal Dengan Musik Dj Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al Washliyah (Sebuah Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)
5.	Nur Azizah	PNS Asisten Ahli/IIIb	IAIN Manado	4 (empat)	1. Pawai Takbir Mobil Hias Malam 1 Syawal Dengan Musik Dj Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al Washliyah (Sebuah Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) 2. Hukum Jual Beli Asi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik 3. Ketentuan Melafadzkan Rukun Qauli Dalam Salat Bagi Difabel Wicara (Analisis Imam Abu Hanifah Dan Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i) 4. Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

4. AZ-ZARQA: Jurnal Hukum Bisnis Islam

NO	NAMA	PANG./ GOL.	INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
1.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.	NON PNS Asiten Ahli (III/b)	Universitas Perwira Purbalingga	3 (Tiga)	1. Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition. 2. Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management 3. Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal
2.	Nur Mifchan Solichin, S.H., M.H.	PNS Asiten Ahli (III/b)	UIN Salatiga	2 (dua)	1. Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung). 2. Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPdata

3.	Chusna Chalawatulloh, M.H.	Ann S.H.,	NON PNS Asiten Ahli (III/b)	STIEBS NU Garut	3 (Tiga)	1. Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars 2. Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management 3. The Nisbah of Indomaret Musyarakah Franchise in Indonesia: MUI Approach
4.	Muhammad Shiddiqy, S.H., M.H.	Ash-	PNS Asiten Ahli (III/b)	(UIN) Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto	2 (Dua)	1. Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal 2. Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata
5.	Dakum, M.H.		NON PNS Asiten Ahli (III/b)	UNIMMA Magelang	2 (Dua)	1. SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah 2. Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung
6.	Aang Ashary, M.H.		PNS Asiten Ahli (III/b)	UIN Walisongo	2 (dua)	1. Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World 2. Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung)
7.	Ahmad Hujaj, M.H.		NON PNS Asiten Ahli (III/b)	UNU Yogyakarta	2 (Dua)	1. The Nisbah of Indomaret Musyarakah Franchise in Indonesia: MUI Approach 2. Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development

5. SUPREMASI: Jurnal Kajian Ilmu Hukum

NO	NAMA	PANG./ GOL.	INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
1.	Hariyanto, M.H.	PNS (III C)	UIN SAIZU PUERWOKERTO	2 (dua)	1. <u>Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam</u> 2. Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

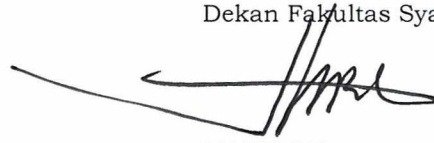
2.	Dr. Ilya Muhsin	PNS (IV C)	UIN Salatiga	2 (dua)	1. <u>Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam</u> 2. Kemudahan Perizinan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Kajian Partisipasi Publik dalam Penyusunan Amdal)
3.	Sahur Ramsay, SH. MH.	Non PNS (III/b)	IAIN AMBON	1 (satu)	<u>Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam</u>
4.	Dr. Siti Nurhayati	PNS (IIIC)	IAIN KEDIRI	1 (satu)	<u>Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy</u>
5.	Misbahul Munir, M.Hum	PNS (III C)	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	1 (satu)	1. <u>Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)</u>
6.	Cipto Sembodo, M.Ag.	Non PNS (III/b)	UNCOK Yogyakarta	1 (satu)	1. <u>Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam</u>
7.	Dr. Vivi Ariyanti	PNS (III C)	UIN PURWOKERTO	2 (dua)	1. <u>Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)</u> 2. Rekognisi Dan Redistribusi Dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser Dan Axel Honneth
8.	Mabaroh Azizah	Non PNS (III/b)	UIN PURWOKERTO	1 (satu)	<u>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19</u>
9.	Januariansyah Arfaizar, SHI, ME	Non PNS (III/b)	STAIYO YOGYAKARTA	1 (satu)	77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis
10.	Dr. Oheo K. Haris	PNS (III D)	UNIVERSITAS HALUOLEO SULAWESI	2 (dua)	1. <u>Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah</u> 2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
11.	Bagus Sarnawa, S.H., M.H.	Non PNS (III/b)	UMY Yogyakarta	1 (satu)	<u>Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah</u>
12.	Dian Eka Prastiwi, SH.,MH.	Non PNS (III/b)	Universitas Pamulang, Banten	1 (satu)	Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

13.	Rizky Amelia Fathia, SH.,MH	Non PNS (III/b)	Universitas Semarang	1 (satu)	Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021
-----	-----------------------------	-----------------	----------------------	-------------	--

6. STAAT RECHTS: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik

NO	NAMA	PANG./ GOL.	INSTITUSI	JMLH NSKH	JUDUL ARTIKEL
1.	Ach. Faidi, SH., LL.M.	PNS Lektor (III/c)	IAIN Madura	3 (tiga)	1. Political Will Ikn Authority System (Oikn) In Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 2. Tantangan Pembangunan Dan Hukum Di Indonesia Pasca Pandemic Covid-19. 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa
2.	Eka Putra B. Santoso, SE. M.Sos.	PNS Asisten Ahli (III/b)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	2 (dua)	1. Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 2. Islam Dan Nasionalisme (Studi Atas Pergumulan Islam Dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia)
3.	Hairiyah, S.Pd., MSI.	Non. PNS Lektor (III/c)	Universitas Alma Ata Yogyakarta	2 (dua)	1. Etika Profesi Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia 2. Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR
4.	Irham Ramur, SH., MH.	Non PNS	UGM Yogyakarta	3 (tiga)	1. Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan 2. Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Dampak Pada Otonomi Daerah 3. Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia

a.n. Rektor,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


MAKHRUS